

## KONTRIBUSI KOMITE SEKOLAH DI SMA NEGERI 9 MAKASSAR

Nurul Ardianti<sup>1</sup>, M. Ridwan Said Ahmad<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Pendidikan Sosiologi-FIS UNM

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Kontribusi komite sekolah dan 2) Kendala-kendala yang dihadapi komite sekolah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik dalam menentukan informan menggunakan purposive sampling, dengan kriteria yaitu kepala sekolah, pengurus inti komite sekolah (ketua, sekretaris dan bendahara) dan anggota komite sekolah sebanyak 2 orang. Jumlah informan sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengabsahan data menggunakan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kontribusi komite sekolah di SMA Negeri 9 Makassar a) sebagai badan pertimbangan yaitu komite sekolah bekerja sama dengan pihak sekolah dalam perencanaan, penyusunan program dan pengambilan keputusan, b) sebagai badan pengontrol yaitu mengontrol keaktifan kepala sekolah, guru, siswa, dan staf dalam kegiatan sekolah, c) sebagai badan pendukung yaitu memberi semangat dan motivasi kepada anggota lain dan d) sebagai badan penghubung seperti melibatkan orangtua, masyarakat dan instansi lain. 2) Kendala-kendala yang dihadapi komite sekolah di SMA Negeri 9 Makassar adalah kendala waktu seperti anggota komite terlambat bahkan tidak menghadiri rapat pertemuan karena sibuk dengan urusan yang lain. Keterbatasan dana yakni pihak komite sekolah kekurangan dana dengan adanya pendidikan gratis, kurangnya peran serta masyarakat yaitu peran serta masyarakat selaku orangtua siswa masih belum menganggap kehadiran mereka dalam rapat komite yang dilaksanakan di sekolah tidak berpengaruh dengan hadir atau tidak hadirnya mereka.

**Kata kunci :** Komite Sekolah.

### ABSTRACT

This study aims to determine: 1) school committee contributions and 2) constraints faced by the school committee. This type of research is descriptive qualitative. The technique in determining the informants using purposive sampling, with the criteria of the principal, the principal committee of the school committee (chairman, secretary and treasurer) and members of the school committee as many as 2 people. The number of informants was 6 people. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Data analysis uses data collection, data presentation, data reduction and conclusion drawing. Data validation techniques using member check. The results showed that: 1) The contribution of the school committee at SMA Negeri 9 Makassar a) as a consideration body namely the school committee in collaboration with the school in planning, programming and decision making, b) as a controlling body that controls the activeness of principals, teachers, students, and staff in school activities, c) as supporting bodies namely encouraging and motivating other members and d) as liaison bodies such as involving parents, communities and other agencies. 2) Constraints faced by school committees at SMA Negeri 9 Makassar are time constraints such as late committee members not even attending meetings because they are busy with other matters. Limited funds, namely the school committee lacking funds with free education, lack of community participation, namely community participation as parents of students still do not consider their attendance at the committee meetings held at school does not affect their attendance or absence.

**Keywords :** School Comite

## PENDAHULUAN

Pembentukan komite sekolah merupakan penjabaran dari konsep otonomi sekolah, dan merupakan perwujudan dari desentralisasi pendidikan. Peran masyarakat dan orangtua dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah diakomodasi melalui sebuah badan bernama komite ke sekolah. Sekolah berada pada jantung komunitas atau masyarakat setempat yang memiliki satu tradisi yang kaya tentang keterlibatan orangtua siswa dan komunitasnya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk mengembangkan tradisi tersebut

maka dibentuklah satu lembaga yang dikenal sebagai komite sekolah. Pembentukan komite sekolah merupakan penjabaran dari konsep otonomi sekolah, dan merupakan perwujudan dari desentralisasi pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa: Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Konsep manajemen berbasis sekolah dan dewan sekolah, komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokrasi oleh para stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Komite sekolah merupakan penyempurnaan dan perluasan badan kemitraan dan komunikasi antara sekolah dengan masyarakat. Sampai tahun 1994 mitra sekolah hanya terbatas dengan orangtua peserta didik dalam wadah yang disebut dengan POMG (Persatuan Orangtua dan Guru). “Peran Komite Sekolah secara legal mulai digulirkan sejak 2 April 2002 meski sesungguhnya peran sejenis sudah berjalan dalam bentuk kemitraan antara guru dan orangtua murid yakni melalui lembaga Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (B3P)”.

Dibentuknya komite sekolah dimaksudkan agar adanya strata organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta kepedulian terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar budaya, demokratis, ekologis nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Dalam melaksanakan fungsi, komite sekolah bertugas untuk:

- a. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait: Kebijakan dan program sekolah, Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah/rencana kerja dan anggaran sekolah, Kriteria kinerja sekolah, Kriteria fasilitas pendidikan disekolah, Kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain
- b. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif
- c. Mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah.

Adanya sinergi antara komite sekolah dengan pihak sekolah melahirkan tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam pembangunan pendidikan. Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerah. Pihak sekolah harus mampu meyakinkan orangtua, pemerintah setempat, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya bahwa sekolah itu dapat dipercaya. Oleh sebab itu, sekolah pada tataran teknis perlu mengembangkan kemampuan menganalisis biaya sekolah yang berkorelasi signifikan terhadap mutu pendidikan yang diperolehnya. Komite sekolah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif artinya komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (client model) berbagai kewenangan (power sharing and advocacy model) dan kemitraan (partnership model) yang berfokus pada peningkatan mutu pendidikan di daerah.

Adapun tujuan dibentuknya komite sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut:

- 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- 2) Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 3) Meningkatkan suasana dan kondisi transparan akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Melalui pertimbangan untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan, menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) memandang perlu dilakukan revitalisasi tugas komite sekolah berdasarkan prinsip gotong royong. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite sekolah berkedudukan ditiap sekolah, berfungsi dalam peningkatan pelayanan pendidikan; menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional dan akuntabel.

Pembentukan komite sekolah merupakan penjabaran dari konsep otonomi sekolah, dan merupakan perwujudan dari desentralisasi pendidikan. Peran masyarakat dan orangtua dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah diakomodasi melalui sebuah badan bernama komite ke sekolah. UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 Pasal 56 ayat (3) menyatakan bahwa: Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Komite sekolah merupakan badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dan berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dari hasil pendidikan. Adanya fenomena yang berkembang dimasyarakat terhadap keberadaan komite sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu komite sekolah merupakan organisasi baru dalam dunia pendidikan yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam khususnya dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

SMA Negeri 9 Makassar merupakan salah satu sekolah Negeri yang dalam hal kualitas pendidikan dapat dikatakan unggul yang berada di Kota Makassar. Hal tersebut dapat kita lihat sendiri dari jumlah kelulusan siswanya dari tahun ke tahun tetap mencapai nilai standar kelulusan. Begitupun dengan kegiatan ekstrakurikuler yang selalu unggul dibandingkan sekolah lainnya. Peningkatan mutu pendidikan sekolah di SMA Negeri 9 Makassar, tidak terlepas dari peran serta pihak yang berada di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Pihak yang termasuk dalam lingkungan sekolah adalah kerja sama yang baik antara kepala sekolah, guru serta karyawan yang ada di sekolah tersebut. Semua melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing dengan baik.

Berdasarkan hasil pengamatan di SMA Negeri 9 Makassar bahwa organisasi komite sekolah telah melaksanakan tugasnya dengan baik yang salah satunya yaitu dapat meningkatkan kinerja dari sekolah. Komite sekolah di SMA Negeri 9 Makassar menjadi wadah atau sarana yang tidak hanya difungsikan dalam hal memberikan bantuan berwujud material saja namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide dan gagasan

inovatif dalam meningkatkan mutu sekolah di SMA Negeri 9 Makassar. Dalam melaksanakan peran dan fungsinya tersebut tentunya tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Relevansi teknik pengumpulan data itu tergantung pada permasalahan, jenis penelitian, serta kondisi penelitian itu sendiri. Agar sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Adapun kriteria informan pada penelitian ini yaitu Pengurus inti yakni (ketua komite, bendahara dan sekertaris), Anggota komite sekolah dan Kepala sekolah sebagai narasumber. Analisis data menggunakan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengabsahan data pada penelitian ini menggunakan member check.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah. Dalam era otonomi sekolah sekarang ini ruang gerak dari para guru dan kepala sekolah lebih luas termasuk dalam mengelola anggaran pendidikan di sekolah. Adanya keleluasaan gerak kepala sekolah mengelola anggaran tersebut menyebabkan peranan komite sekolah menjadi besar, sebab keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan selalu melibatkan semua pihak.

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pelaksanaannya dalam bentuk pemberian dalam perencanaan, penyusunan program, pengambilan keputusan serta memberikan masukan (nasehat) yang berhubungan dengan mutu sekolah di SMA Negeri 9 Makassar tidak lepas dengan adanya kontribusi komite. Semua hal yang berhubungan dengan sekolah harus diketahui oleh komite sekolah. Berdasarkan hasil wawancara tentang peran komite dalam memberikan pertimbangan dengan kepala sekolah SMA Negeri 9 Makassar yang menyatakan bahwa Komite sekolah khususnya di SMA Negeri 9 Makassar sebagai partner yang berperan sebagai pemberi pertimbangan pada setiap rencana program dan kebijakan telah bekerja sama dengan baik dan semua program yang direncanakan sekolah yang digunakan oleh pihak sekolah dalam usaha memajukan kualitas sekolah.

Peran komite sebagai pengontrol ditunjukkan dalam bentuk pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan di sekolah, melakukan penilaian terhadap kualitas kebijakan yang diambil sekolah. Badan pengontrol sudah menunjukkan kinerja yang baik, yakni dalam fungsi mengontrol keaktifan kepala sekolah, guru, siswa, staf baik dalam kehadiran maupun kegiatan sekolah, proses pengambilan keputusan, memantau kondisi ketenaga pendidikan, serta memantau sarana dan prasarana. Hal senada diungkapkan oleh kepala sekolah SMA Negeri 9 Makassar yang menyatakan bahwa kegiatan controlling ini dilakukan terhadap aspek keuangan saja, tetapi juga pada aspek kegiatan yang dilakukan pihak sekolah.

Fungsi lain merupakan bagian dari uraian permendikbud bahwa peran komite sebagai pendukung sekolah baik dalam pencapaian tujuan sekolah dan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dukungan yang diberikan komite sekolah berupa materil dalam bentuk sarana yang belum ada di sekolah dan dibutuhkan oleh sekolah selain itu

juga berupa pemantauan terhadap kondisi dari pada tenaga pendidik dan non pendidik dalam hal ini adalah staf karyawan, selain itu dukungan yang diberikan juga berupa pemantauan kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Melakukan koordinasi dukungan sarana dan prasarana di sekolah, memantau kondisi anggaran pendidikan sekolah, dan mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran sekolah. Hal yang berkaitan disampaikan oleh kepala sekolah SMA Negeri 9 Makassar yang beranggapan bahwa peran komite sangat besar dalam memberi dukungan terhadap pendidikan terutama mengenai program kegiatan proses belajar mengajar dan respon terhadap kegiatan ekstrakurikuler, komite sudah menunjukkan partisipasinya.

Sedangkan peran komite sebagai mediator sejauh ini wujudnya berupa penghubung antara kepala sekolah dengan masyarakat, kepala sekolah dengan dewan pendidikan serta kepala sekolah dengan sekolah itu sendiri dalam hal ini Guru, staf karyawan dan murid, selain itu komite juga ikut serta dalam membuat usulan kebijakan dan beberapa program pendidikan kepada sekolah. Menjadi penampung aspirasi masyarakat dalam hal ini berupa pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program pendidikan dan menyampaikannya keluhan tersebut kepada instansi terkait dalam bidang pendidikan di sekolah. Dengan adanya peran komite sekolah sebagai mediator antara sekolah dengan masyarakat maka akan mempermudah masyarakat dalam menyalurkan apa yang menjadi aspirasi mereka, dan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat dapat dijadikan masukan untuk sekolah sehingga sekolah dapat mengoreksi apa saja kekurangan yang ada di sekolah dan secara bersama-sama antara masyarakat, sekolah dan komite sekolah dapat mencari jalan keluarnya.

Oleh sebab itu apa yang menjadi tujuan sekolah dapat tercapai dengan lancar dan mutu pendidikan pun dapat diperbaiki, hal senada di sampaikan oleh bapak kepala sekolah SMA Negeri 9 Makassar yang menyatakan bahwa peran komite sebagai badan penghubung antara sekolah dengan masyarakat, guru, orangtua, DPR, instansi lain itu sangat penting karna kedudukan komite juga sebagai perwakilan dari orangtua siswa dan masyarakat di sekolah sehingga persoalan yang timbul di sekolah yang ada hubungannya dengan orangtua siswa, masyarakat dan lain-lain dengan sendirinya pengurus komite SMA Negeri 9 Makassar terlibat langsung untuk menyelesaikan masalah tersebut, termasuk menghubungi pihak-pihak lain.

Teori struktural fungsionalisme beranggapan bahwa masyarakat itu merupakan sistem yang secara fungsional terintegrasi kedalam bentuk keseimbangan. Masyarakat adalah suatu sistem yang secara keseluruhan terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung, memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam tatanan struktur masyarakat. Bagian-bagian harus dipahami dalam kaitannya dengan fungsinya terhadap keseimbangan sistem keseluruhan, sehingga bagian-bagian tersebut menunjukkan gejala saling tergantung dan saling mendukung untuk memelihara keutuhan sistem. Antara komite sekolah dengan sekolah mempunyai fungsi dalam rangka mewujudkan mutu sekolah yang berkualitas. Dalam perspektif fungsional struktural, struktur sosial dan pranata sosial berada dalam sistem sosial yang terdiri atas elemen-elemen ataupun bagian-bagian yang saling menyatu dan mempunyai keterkaitan dalam keseimbangan.

Dalam pengertian lain, Djam'an Satori menyebutkan bahwa komite sekolah merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai forum resmi untuk mengakomodasikan dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan kelembagaan sekolah. Penelitian di atas menunjukkan bahwa komite sekolah di SMA Negeri 9 Makassar sudah menjalankan tugasnya berdasarkan perannya masing-masing, sesuai dengan Permendikbud No 75 Tahun 2016 komite sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam

peningkatan mutu pelayanan dan memberi pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana pada satuan pendidikan.

Selanjutnya hasil penelitian relevan dengan penelitian Junaedi dengan judul “Kontribusi Peran Komite Sekolah Terhadap Mutu Layanan Pendidikan Di SMKN 1 Depok”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: peran komite sekolah di SMKN 1 Depok belum diartikan secara menyeluruh oleh stakeholder pendidikan terutama oleh anggota komite sekolah itu sendiri, sehingga mutu layanan pendidikan di sekolah itu belum dirasakan oleh pengguna pendidikan. Dengan demikian perlunya perbaikan yang menyeluruh pada komponen-komponen yang dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan, khususnya perbaikan pada peran komite sekolah dimana masih banyak kekurangan yang sangat menonjol dan perlunya perbaikan secara berkelanjutan supaya peningkatan mutu layanan pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh stakeholder pendidikan.

Kendala waktu sesuai dengan hasil penelitian diatas yang menjadi faktor penghambat pengurus komite dalam menjalankan perannya karena para pengurus dominan mempunyai pekerjaan atau kepentingan lain diluar sekolah sehingga tidak ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dalam suatu rapat atau penyelenggaraan kegiatan di sekolah. Orangtua umumnya mempunyai alasan untuk tidak terlibat secara aktif di sekolah, khususnya sebagai anggota komite sekolah karena berbagai alasan yang secara umum dikarenakan kurangnya partisipasi pengurus dan masyarakat. Dari hasil wawancara di atas kendala yang dihadapi pengurus komite adalah masalah dana. Bahwa pendidikan gratis harusnya tidak menjadi sebuah alasan ketidak aktifan, karena peran sebagai komite bukan hanya sekedar mengumpulkan dana, pendidikan gratis harusnya mampu mendorong komite untuk memanfaatkan potensi lain yang ada dalam masyarakat guna mengumpulkan dana. Kondisi tersebut mengharuskan komite sekolah harus menempuh berbagai cara, khususnya dengan mempertimbangkan aspek anggaran atau dana yang tersedia untuk pengadaan atau pembangunan fasilitas sekolah.

Dari hasil wawancara di atas yang termasuk juga faktor penghambat atau kendala yang dihadapi yakni kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya proses pengambilan keputusan di sekolah. Dapat dikatakan bahwa peran serta masyarakat selaku orangtua siswa masih belum menggap kehadiran mereka dalam rapat komite yang dilakanakan di sekolah tidak berpengaruh dengan hadir atau tidak hadirnya mereka. Lain halnya jika komite sekolah benar-benar ikut serta dalam menjalankan perannya dalam sekolah dan komite sekolah terjun langsung dalam sekolah maka jelas akan ada perbedaan yang besar antara komite sekolah yang berperan aktif dengan komite yang tidak berperan aktif. Jika komite sekolah berperan aktif maka akan ada peningkatan mutu pendidikan disekolah karena sekolah akan dipantau atau dicek terus oleh komite sekolah. Jika komite sekolah dan masyarakat selaku orangtua siswa selalu berintraksi dan berjalan secara bersama-sama dan benar-benar aktif dalam menjalankan perannya masing-masing maka mutu dari sekolah tersebut akan mengalami peningkatan kearah yang lebih baik lagi dan apa yang menjadi tujuan dari sekolah bisa terwujud dengan baik.

Selanjutnya, hasil penelitian jika dikaitkan dengan teori yang digunakan, dalam hal ini adalah teori Struktural fungsionalisme oleh Robert K.Merton yang mengembangkan konsep fungsi dan difungsi atau fungsi laten dan fungsi manifest. Fungsi manifest adalah fungsi dasar yang diharapkan dari sebuah lembaga, sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang tidak diharapkan dalam lembaga. Maka dalam permasalahan ini dapat dikatakan bahwa pada pengurus komite di SMA Negeri 9 terjadi fungsi manifest dan fungsi laten didalamnya. Fungsi manifestnya adalah pengurus komite menjalankan tugasnya sesuai perannya sebagai badan penghubung, pengontrol, pendukung, pertimbangan. Sementara itu

fungsi latennya adalah adanya kendala-kendala yang dihadapi pihak komite sekolah dalam menjalankan perannya.

## **PENUTUP**

Kontribusi komite sekolah yaitu sebagai badan pertimbangan b) sebagai badan pengontrol c) sebagai badan pendukung d) sebagai badan penghubung. Kendala yang dihadapi oleh pengurus komite di SMA Negeri 9 Makassar yaitu kendala waktu, Keterbatasan dana dan kurangnya peran serta masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Prasetia, Bayou. 2016. *Undang-Undang Sisdiknas Sistem Pendidikan Nasional & PP No. 32 Tahun 2013 Tentang perubahan PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional*. Surabaya: Permata Press.
- Fatah, Nanang. 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Pendidikan*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Efendy, Muhadjir. "Permendikbud No 75 tahun 2016 tentang Komite sekolah.". 05 April 2018. <http://luk.staff.ugm.ac.id>.
- Zamroni. 2013. *Manajemen Pendidikan Suatu Usaha Meningkatkan Mutu Sekolah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Umaedi, dkk. 2013. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.